



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025

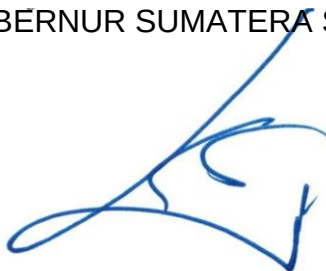
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagai sarana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 melalui berbagai kegiatan tahunan sebagai bahan untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja yang baik. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat rencana capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025 ini. Semoga Rencana Kinerja Tahun 2025 yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2025
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI, S.H., M.S.E

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR lii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
 1.1. Gambaran Umum 1
 1.2. Profil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 1
 1.2.1. Kondisi Geografi 1
 1.2.2. Kondisi Topografi 3
 1.2.3. Kondisi Geologi 3
 1.2.4. Kondisi Hidrologi 4
 1.2.5. Kondisi Klimtologi 4
 1.2.6. Kondisi Demografi 4
 1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 5
 1.4. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 6
 1.5. Sistematika Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 6
BAB II KETERKAITAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 7
 2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 7
 2.1.1. Keterkaitan RKT dengan RPD Provinsi Sumatera Selatan 7
 2.1.2. Keterkaitan RKT dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 8
 2.1.3. Keterkaitan RKT dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 10
 2.1.4. Keterkaitan RKT Provinsi dengan RKT Kabupaten/Kota 11
 2.1.5. Keterkaitan RKT dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 11
 2.1.6. Keterkaitan RKT dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 11
BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 13
 3.1. Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Anggaran 13
 3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 15
 3.3. Prioritas Pembangunan Daerah 17
 3.4. Anggaran Pendukung Kinerja Prioritas Daerah 20
 3.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 29
BAB V PENUTUP 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 3

Gambar 3.1. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah 17

Gambar 3.2. Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKT Tahun 2025 17

Gambar 3.3. Prioritas Daerah I 18

Gambar 3.4. Prioritas Daerah II 19

Gambar 3.5. Prioritas Daerah III 19

Gambar 3.6. Prioritas Daerah IV 19

Gambar 3.7. Prioritas Daerah I, Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan
Trantibum 21

Gambar 3.8. Prioritas Daerah II, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .. 22

Gambar 3.9. Prioritas Daerah II, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .. 23

Gambar 3.10. Lokus Prioritas Daerah II, Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat 24

Gambar 3.11. Prioritas Daerah III, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
Kerakyatan 25

Gambar 3.12. Prioritas Daerah III, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
Kerakyatan 26

Gambar 3.13. Lokus Prioritas Daerah III, Pembangunan Infrastruktur dan
Ekonomi Kerakyatan..... 27

Gambar 3.14. Prioritas Daerah IV, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
dan Pengelolaan Bencana 28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	2
Tabel 1.2.	Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	5
Tabel 2.1.	Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKT Tahun 2025	10
Tabel 2.2.	Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dan Nasional Tahun 2025	12
Tabel 3.1.	Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022-2025	13
Tabel 3.2.	Realisasi Anggaran dan Proyeksi Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022-2025	14
Tabel 3.3.	Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021-2024	14
Tabel 3.4.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	15
Tabel 3.5.	Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	18
Tabel 3.6.	Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 disusun agar dapat lebih meningkatkan keberhasilan Akuntabilitas Kinerja yang ingin dicapai dalam melaksanakan aktivitas pelayanan terhadap publik. Proses pencapaian Kinerja Tahunan merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih terperinci dimasa yang akan datang guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas jalannya pemerintahan. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai pelaksanaannya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan 2025 ini memuat rencana capaian atau target kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada. Target yang disusun telah menjadi komitmen kami untuk dijadikan Target Kinerja dalam periode tahun 2025 yang tentu saja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

1.2. Profil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.2.1. Kondisi Geografi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi geografis terletak antara 10 25' 13'' sampai 40 55' 17'' Lintang Selatan dan antara 1020 3' 52'' dan 1060 19' 45'' Bujur Timur, yang berbatasan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Secara Geografis Provinsi Sumatera Selatan memiliki letak yang strategis, daerah pantai timur merupakan jalur pelayaran dengan potensi maritim. Posisi geografis ini menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan dialiri oleh banyak sungai-sungai besar dan kecil. Letak geografis Provinsi Sumatera Selatan secara umum sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai pelabuhan yang menjadi konektivitas wilayah Sumatera Selatan dengan wilayah lainnya baik sebagai sarana transportasi maupun jalur perdagangan. Selain itu kondisi geografis ini juga menyebabkan adanya sumber daya alam berupa

minyak bumi dan gas alam, batubara, dan lahan budidaya pertanian berupa lahan basah, perkebunan dan hutan.

Dengan luas wilayah yang mencapai 86.771,864 km², Sumatera Selatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota, yang terbagi atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota serta 241 kecamatan, 2.855 desa dan 403 kelurahan. Dengan Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi.

Jika dilihat dari luas wilayahnya maka Kabupaten yang terluas di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 17.071,333 Km² dan disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) seluas 14.550,788 Km². Sedangkan luas wilayah terkecil di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang seluas 352,506 Km² dan Kota Lubuk Linggau seluas 367,726 Km².

Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Selatan tahun 2022 sebesar 99,77 jiwa per Km². Kabupaten/ kota di Sumatera Selatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah kota Palembang dengan kepadatan penduduk sebesar 4.680,72 jiwa per Km². Kemudian disusul oleh kota Lubuk Linggau dengan kepadatan penduduk sebesar 503,55 jiwa per Km² dan kemudian Kota Pagar Alam dengan kepadatan penduduk sebesar 399,94 jiwa per Km². Untuk Kabupaten/ Kota dengan kepadatan penduduk terendah adalah kabupaten Musi Rawas Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 32,38 jiwa per Km².

Tabel 1.1.
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Kode ^a	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²) ^a	Jumlah ^a			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) ^b
				Kec	Desa	Kel	
1	16.01	Ogan Komering Ulu	3.774,50	13	157	14	100,45
2	16.02	Ogan Komering Ilir	17.071,33	18	327	13	46,71
3	16.03	Muara Enim	6.763,91	22	256	10	93,70
4	16.04	Lahat	4.333,07	24	377	18	102,69
5	16.05	Musi Rawas	6.122,59	14	199	13	66,59
6	16.06	Musi Banyuasin	14.550,79	15	242	13	44,29
7	16.07	Banyuasin	12.626,76	21	313	25	71,29
8	16.08	OKU Timur	3.412,72	20	332	7	152,89
9	16.09	OKU Selatan	4.369,25	19	259	7	124,30
10	16.10	Ogan Ilir	2.302,86	16	241	14	187,18
11	16.11	Empat Lawang	2.234,10	10	156	9	153,16
12	16.12	PALI	1.842,56	5	89	6	110,00
13	16.13	Muratara	5.937,80	7	71	7	33,00
14	16.14	Palembang	352,51	18	0	107	4.840,63
15	16.15	Pagar Alam	625,91	5	0	35	236,19
16	16.16	Lubuk Linggau	367,73	8	0	72	660,75

No	Kode ^a	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²) ^a	Jumlah ^a			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) ^b
				Kec	Desa	Kel	
17	16.17	Prabumulih	477,31	6	0	37	448,62
		Sumatera Selatan	86.771,684	241	3.019	251	100,76

Sumber: ^a Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau; dan ^b Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2024

Gambar 1.1. Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : geoportal.sumselprov.go.id, 2017

1.2.2. Kondisi Topografi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai topografi yang bervariasi mulai pegunungan di bagian Barat dengan ketinggian rata-rata antara 900-1200 mdpl yang merupakan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan di bagian tengah merupakan wilayah landai atau dataran rendah yang luas. Bagian Timur merupakan daerah pantai dan wilayah pesisir yang terdiri dari rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Panjang Kawasan Pesisir di Provinsi Sumsel ± 450 Km dari Sungai Benu (batas Provinsi Jambi) sampai Sungai Mesuji (batas Provinsi Lampung).

1.2.3. Kondisi Geologi

Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tercier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis batuan yang terdapat di Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan

tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara; (2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6) formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

1.2.4. Kondisi Hidrologi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumber daya air dengan sumber air utama dari Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai- sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau.

1.2.5. Kondisi Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17- 634,4/22 mm sepanjang tahun. Setiap bulan hujan cenderung turun dan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 26,4°C hingga 27,8°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 26,8°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Agustus, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni, dimana merupakan salah satu pemicu timbulnya hotspot (titik api) yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan kelembapannya bervariasi antara 81 sampai dengan 88 persen.

1.2.6. Kondisi Demografi

Pada tahun 2022 total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 8.657.008 jiwa yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota. Jumlah penduduk

terbesar berada di Kota Palembang sebesar 1.707.996 jiwa dan terkecil di Kota Pagar Alam dengan jumlah penduduk sebesar 147.071 jiwa.

Tabel 1.2.
Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2020-2024

KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Penduduk Tahun				
	2020*	2021*	2022*	2023*	2024*
Ogan Komering Ulu	367.603	371.106	375.538	379.130	383.039
Ogan Komering Ilir	769.348	772.742	776.690	797.429	807.085
Muara Enim	612.900	617.846	624.019	633.779	640.962
Lahat	430.071	434.939	441.174	444.949	450.281
Musi Rawas	395.570	398.732	402.674	407.694	411.787
Musi Banyuasin	622.206	627.070	633.124	644.386	651.950
Banyuasin	836.914	843.871	852.576	874.210	885.902
OKU Timur	649.853	653.062	656.857	668.035	674.184
OKU Selatan	408.981	416.616	426.687	424.190	429.535
Ogan Ilir	416.549	419.401	422.907	431.043	436.141
Empat Lawang	333.622	343.839	357.673	342.178	345.641
PALI	194.900	197.290	200.368	202.681	205.384
Musi Rawas Utara	188.861	190.420	192.369	195.962	198.413
Palembang	1.668.848	1.686.073	1.707.996	1.706.371	1.718.440
Pagar Alam	143.844	145.266	147.071	147.836	149.199
Lubuk Linggau	234.166	236.828	240.238	242.976	246.046
Prabumulih	193.196	195.748	199.047	200.673	203.312
Sumatera Selatan	8.467.432	8.550.849	8.657.008	8.743.522	8.837.301

Sumber: *Badan Pusat Statistik; Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2024

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilakukan secara partisipatif merupakan wahana untuk mencapai kesepakatan dan memantapkan komitmen satuan kerja. Untuk itu kinerja harus memuat spesifikasi yang jelas dan dapat dijadikan sebagai dasar akuntabilitas atas prestasi yang telah disepakati dalam Komitmen Kinerja (Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja).

Para pimpinan satuan kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dituntut profesional dalam melaksanakan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi juga dituntut lebih akuntabel, dalam pengertian tidak hanya memenuhi standar atau spesifikasi dalam komitmen kinerja, tetapi lebih jauh dari itu, sepanjang sumber daya yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih efektif dan efisien lagi.

Suatu tujuan dalam misi tersebut dalam praktiknya dicapai dengan usaha-usaha dari beberapa satuan kerja. Oleh karena itu, pimpinan satuan kerja harus dibebani tanggung jawab untuk memenuhi target-target kinerja yang tertuang di dalam RKT, dan diimbangi dengan pemberian kewenangan dan sumber daya yang memadai.

1.4. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan 2025 mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Menghubungkan RPD, rencana tindak, maupun perencanaan operasional yang terinci;
- 2) Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran;
- 3) Memudahkan melakukan pengukuran kinerja;
- 4) Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik peningkatan kinerja;
- 5) Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kerja;
- 6) Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan pencapaian kinerja.

1.5. Sistematika Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, menjabarkan maksud dan tujuan, manfaat penyusunan dan penyampaian RKT Tahun 2025 serta Sistematika RKT.
- Bab II : Keterkaitan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- Bab III : Rencana Kinerja Tahunan, menjelaskan ikhtisar tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, program, kegiatan dan anggaran Tahun 2025.
- Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

BAB II

KETERKAITAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. RKT merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. RKT disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKT sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sesuai dengan kewenangannya maka, pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip yang meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peranan dan kewenangan masing-masing, terintegrasi dengan rencana tata ruang dan melaksanakan sesuai dengan kondisi daerah serta dinamika daerah dan nasional.

Dalam prosesnya perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis atas bawah dan bawah atas. Selain itu terkait dengan substansi maka perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan Tematik Holistik, Integratif dan Spasial yang lebih dikenal dengan istilah (THIS).

Untuk menyusun rencana pembangunan daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan. RKT yang sudah ditetapkan menjadi acuan dalam penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.1. Keterkaitan RKT dengan RPD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPD Provinsi Sumatera Selatan periode 2024-2026. Berdasarkan RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi didukung Infrastruktur yang Handal
2. Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
3. Sumber Daya Manusia Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing
4. Pembangunan Berkelanjutan dan Efisiensi Sumber Daya
5. Transformasi Pelayanan Publik pada Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

2.1.2. Keterkaitan RKT dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RKT Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan,
2. Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan,
3. Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah,
4. Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Sementara itu kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi Kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1. Memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung,
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.

Sementara itu Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

1. Meningkatkan produktivitas lahan tidur atau lahan non produktif serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional,
2. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
3. Meningkatkan fungsi kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan.

Sinkronisasi dan sinergi RKT dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan:

1. Mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat;
2. Memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
4. Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi;
5. Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
6. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta
7. Menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian kegiatan antar sektor dan antar Perangkat Daerah.

Dalam menyusun RKT, selain berpedoman pada RTRWP, juga perlu memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini untuk melihat posisi Provinsi Sumatera Selatan dalam tataran perencanaan ruang di tingkat nasional. Beberapa wilayah Sumatera Selatan dalam konstelasi tata ruang nasional masuk ke dalam Pusat Kawasan Nasional, Pusat Kawasan Wilayah dan Kawasan Andalan.

Selain itu RKT Sumatera Selatan mencoba melihat arahan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk:

1. Tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi;

2. Keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota;
3. dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2.1.3. Keterkaitan RKT dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Penyusunan RKT Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mengacu pada dokumen RKP 2025 terutama menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan. Keterkaitan RKT Tahun 2025 dan RKP Tahun 2024 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKT Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL (RKP)	PRIORITAS DAERAH (RKT)
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum • Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerak
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	• Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan • Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	• Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat • Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

PRIORITAS NASIONAL (RKP)	PRIORITAS DAERAH (RKT)
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	- Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum - Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Prioritas Daerah RKT Tahun 2025 tersebut disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja RKT Tahun 2024, target RKP Tahun 2025 serta mempertimbangkan situasi terkini sehingga didapat 6 (enam) isu strategis yaitu:

1. Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Stunting
2. Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi
4. Peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung Pemerataan Infrastruktur
5. Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana
6. Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang bai

Tabel 2.2

Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dengan Nasional Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO	NASIONAL	PROVINSI
Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6	5,3-5,5a)
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 – 5,0	3,82 – 3,93a
Tingkat Kemiskinan	7,0 – 8,0	3,82 – 3,93a
Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,316 – 0,320a)
Indeks Modal Manusia	0,56	0,53a)
Penurunan Intensitas Emisi GRK	38,6	69,97a)

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2025

Keterangan: a) Kesepakatan Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 15 Mei 2024

Tabel diatas menunjukkan target indikator makro Provinsi yang harus dicapai di tahun 2025 untuk mendukung capaian nasional.

2.1.4. Keterkaitan RKT Provinsi dengan RKT Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya adalah akumulasi dari capaian pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sinergitas perencanaan pembangunan yang disusun di tiap tingkatan menjadi sangat penting untuk mencapai target-target pembangunan.

2.1.5. Keterkaitan RKT dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

RKT tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berwawasan tahunan. Renja PD merupakan penjabaran teknis RKT yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.6. Keterkaitan RKT dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

RKT menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disusun berdasarkan RKT diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun 2025. Penyusunan RKT dan KUA PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga proses perencanaan hingga pencairan APBD telah menggunakan 1 sistem terpadu.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Anggaran

Pada tahun 2025 struktur APBD Provinsi Sumatera Selatan jumlah anggaran Pendapatan ditetapkan sebesar Rp.7.368.627.067.617,27,- dan jumlah anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 7.657.938.144.305,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 4.598.501.345.925,- ; Belanja Modal sebesar Rp, 949.270.874.438-; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.200.000.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.1.910.165.923.942,- yang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Realiasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
1	PENDAPATAN	10.036.955.961.132,70	9.547.779.371.502,99	10.946.788.597.685,00	7.368.627.067.617,27
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.930.954.855.677,74	4.875.950.557.289,99	4.760.692.664.094,00	3.719.110.730.617,27
A	Pendapatan Pajak Daerah	4.461.152.465.008,25	4.287.466.538.999,46	4.301.394.172.077,00	3.455.648.357.907,77
B	Pendapatan Retribusi Daerah	12.185.155.716,25	12.477.067.295,00	10.742.574.923,00	5.213.358.400,00
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	153.032.882.582,11	223.885.947.856,00	165.607.917.094,00	92.000.014.309,50
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	304.584.352.371,13	352.121.003.139,53	282.948.000.000,00	166.249.000.000,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.090.093.999.526,00	4.667.946.127.537,00	6.182.352.680.591,00	3.645.773.084.000,00
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.090.093.999.526,00	4.667.946.127.537,00	6.182.352.680.591,00	3.645.773.084.000,00
A.1	Dana Perimbangan	5.029.223.442.526,00	4.667.946.127.537,00	6.182.352.680.591,00	3.645.773.084.000,00
A.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.442.737.296.896,00	1.854.967.347.879,00	765.459.964.000,00	660.778.781.000,00
A.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	2.460.896.938.991,00	1.234.749.372.000,00
A.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.563.041.287.000,00	1.653.766.188.000,00	1.750.244.931.000,00	1.750.244.931.000,00
A.1.4.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.023.444.858.630,00	1.159.212.591.658,00	1.205.750.846.600,00	-
A.2	Dana Insentif Daerah	60.870.557.000,00	-	-	-
B	Kurang Salur DBH dan Pajak	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	15.907.105.929,00	3.882.686.676,00	3.743.253.000,00	3.743.253.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	15.907.105.929,00	3.882.686.676,00	3.743.253.000,00	3.743.253.000,00
1.3.2	Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data diolah)

Tabel 3.2.
Realiasi Anggaran dan Proyeksi Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
2.	BELANJA DAERAH	9.663.575.726.750,69	9.698.252.360.233,98	11.101.099.674.373,00	7.657.938.144.305,00
1.	BELANJA OPERASI	4.499.276.793.174,07	4.975.235.925.372,77	5.242.340.559.164,00	4.598.501.345.925,00
A.	Belanja Pegawai	2.092.571.068.579,00	2.190.116.137.939,00	2.671.071.709.913,00	2.278.540.144.829,00
B.	Belanja Barang dan Jasa	2.042.275.862.382,07	2.405.532.045.847,87	1.997.012.820.857,00	2.129.096.862.526,00
C.	Belanja Bunga	13.227.699.524,00	8.817.133.280,00	2.700.000.000,00	-
D.	Belanja Subsidi	-	-	-	-
E.	Belanja Hibah	351.202.162.689,00	370.770.608.305,90	561.556.028.394,00	190.864.338.570,00
F.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	10.000.000.000,00	
	Belanja Biaya Provinsi Pengelolaan Pinjaman	-	-	-	-
2.	BELANJA MODAL	1.536.370.414.095,28	1.206.711.898.808,99	1.435.352.916.319,00	949.270.874.438,00
A.	Belanja Tanah	8.708.743.955,00	1.743.753.503,00	3.280.000.000,00	3.819.000.000,00
B.	Belanja Peralatan dan Mesin	342.811.302.542,00	345.465.230.996,00	334.971.805.370,00	238.691.833.782,00
C.	Belanja Gedung dan Bangunan	361.568.165.909,82	266.624.790.389,12	289.465.250.050,00	242.959.761.834,00
D.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	747.812.255.898,46	541.178.479.003,87	752.349.130.451,00	439.864.678.822,00
E.	Belanja Aset Tetap Lainnya	75.469.945.790,00	50.703.578.417,00	51.614.748.194,00	23.675.600.000,00
F.	Belanja Aset Lainnya	-	996.066.500,00	3.671.982.254,00	260.000.000,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	19.553.804.801,00	16.000.000.000,00	100.000.000.000,00	200.000.000.000,00
4.	BELANJA TRANSFER	3.608.374.714.680,34	3.500.304.536.052,22	4.323.406.198.890,00	1.910.165.923.942,00
A.	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota	1.914.984.234.446,00	2.179.118.758.571,00	1.984.619.153.254,00	1.385.725.227.045,00
B.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah	1.693.390.480.234,34	1.321.185.777.481,22	2.338.787.045.636,00	524.440.696.897,00

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data diolah)

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 di proyeksikan sebesar Rp.289.311.076.688,- dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2024 di proyeksikan sebesar Rp.135.000.000.000,-.

Tabel 3.3.
Realiasi Anggaran dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 – 2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
3	PEMBIAYAAN	354.251.259.039,14	436.744.445.834,19	424.311.076.688,00	289.311.076.688,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	151.894.033.565,14	322.922.821.755,19	289.311.076.688,00	289.311.076.688,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	202.357.225.474,00	113.821.624.079,00	135.000.000.000,00	-

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2024 (data diolah)

3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, RKT Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, merupakan implementasi tahun pertama dari RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RKT untuk periode ini sangat penting karena merupakan langkah awal dalam pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD, dalam hal ini RPD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2025, RKT Provinsi Sumatera Selatan mengacu tujuan dan sasaran dalam RPD Sumatera Selatan. Adapun Tujuan dan Sasaran serta target yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3-5,5 ^{b)}
		Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Rp.Juta/Kapita	80,77-80,89a)
		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,02
		Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090
	Meningkatnya perekonomian sektor unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan)	%	5,74
		Nilai Tukar Petani	Nilai	109,56
	Meningkatnya ekosistem inovasi	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73
	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	%	2,75
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor serta penyediaan makan dan minum	%	12,85
	Meningkatnya pertumbuhan ekspor daerah nilai	Neraca perdagangan	US\$ Juta	4.297,41
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku	%	15,82
	Terkendalnya laju inflasi daerah	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1 ^{a)}
	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	%	4,88
	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase peningkatan desa maju dan mandiri	%	6,22
	Meningkatnya kemandirian	Persentase satuan permukiman	%	75,00

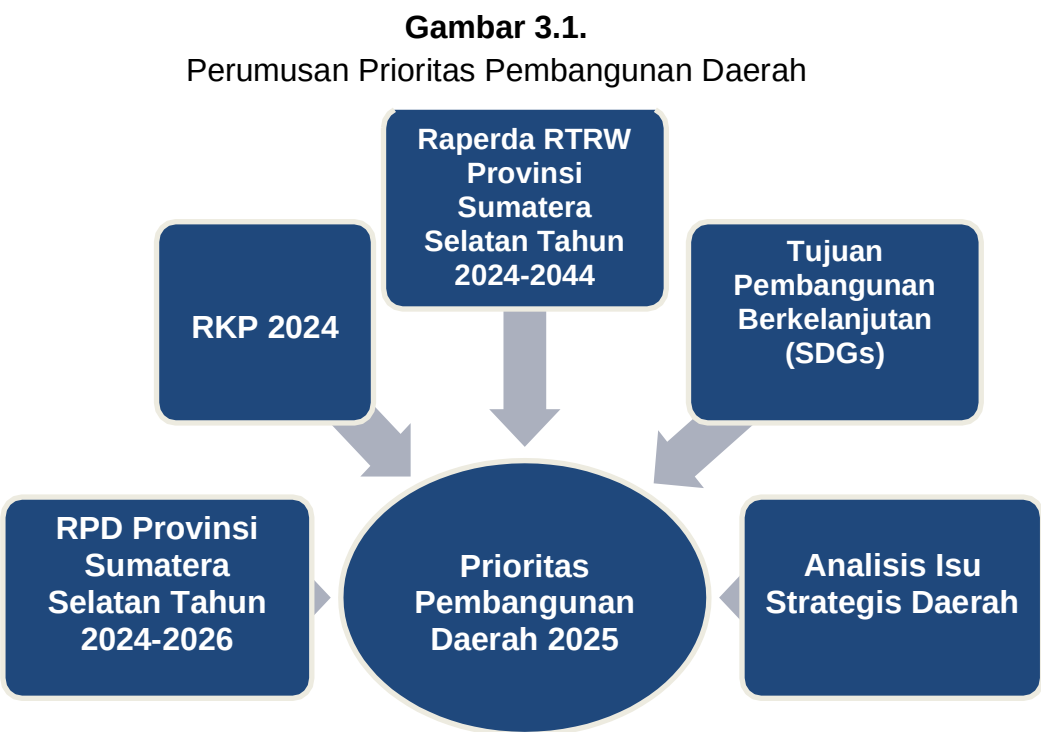
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	transmigran	transmigrasi yang mandiri		
	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	%	2,50
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor serta penyediaan makan dan minum	%	12,70
Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan		Tingkat Kemiskinan	%	9,37-10,37 ^{b)}
		Gini Ratio	Ratio	0,316-0,320 ^{b)}
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82-3,93 ^{b)}
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga	Pengeluaran per kapita	Rp.000/kapita/bln	11.364
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	77,05
	Pengurangan beban rumah tangga miskin	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat perlindungan sosial	%	82,50
		Persentase kasus gizi buruk pada rumah tangga miskin	%	4,50
Meningkatkan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96
		Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,47
		(IPG)	Indeks	72,5
		Indeks Pembangunan Pemuda	%	13,3
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,86
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,70
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,66
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,19 ^{c)}
		Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,66
		Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87,90
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	60,13
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Indeks	43,60
		Indeks Kualitas Air Laut dan Pesisir (IKAL)	Indeks	82,02
	Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah	Persentase penurunan tingkat kerentanan bencana	%	5,00
		Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	%	10,00
Peningkatan tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,25 (B)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80,88
		Opini BPK	Opini	WTP
		Indeks Integritas Daerah	Indeks	74,13
	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A
		Indeks SPBE	Indeks	2,52 ^{a)}

Sumber: RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

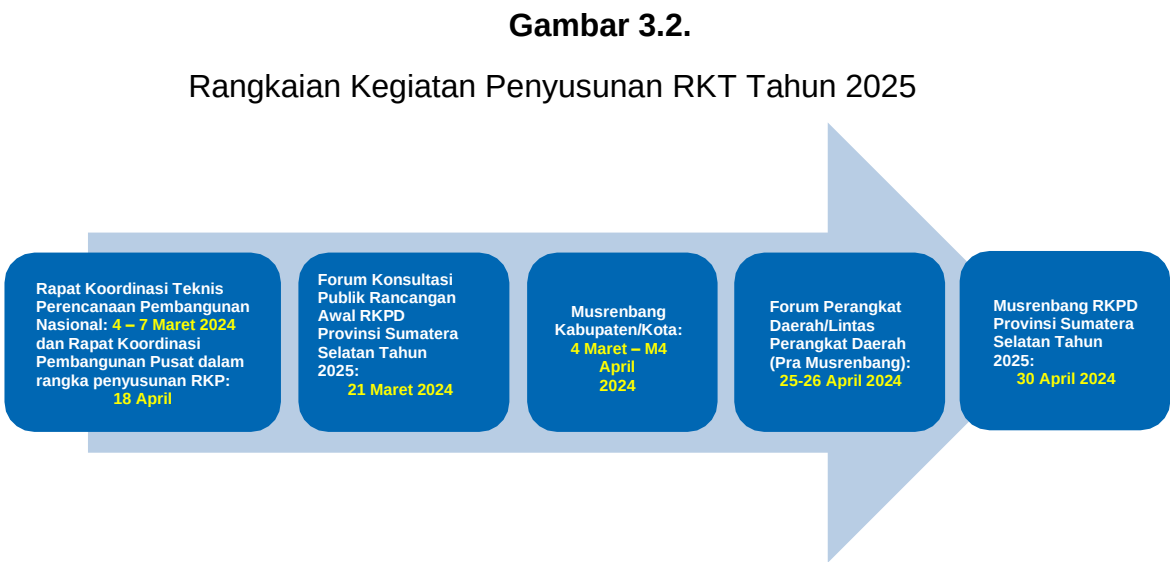
Keterangan: a) Kesepakatan pada Rakortekrenbangnas 2024; b) Kesepakatan Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 15 Mei 2024; c) Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, perlu dilakukan perumusan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, telaah RKP Tahun 2025, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah sesuai gambar berikut:



Untuk menentukan program, kegiatan, sasaran, indikator dan target maka dalam penyusunan Prioritas Daerah RKT tahun 2025, Pemerintah Provinsi melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:



Dengan mempertimbangkan arahan RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, RKP tahun 2025, Raperda RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yaitu **“Penguatan Daya Saing Daerah Menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan”** dengan beberapa Prioritas Daerah RKT Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yaitu :

- 1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- 2. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
- 3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
- 4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

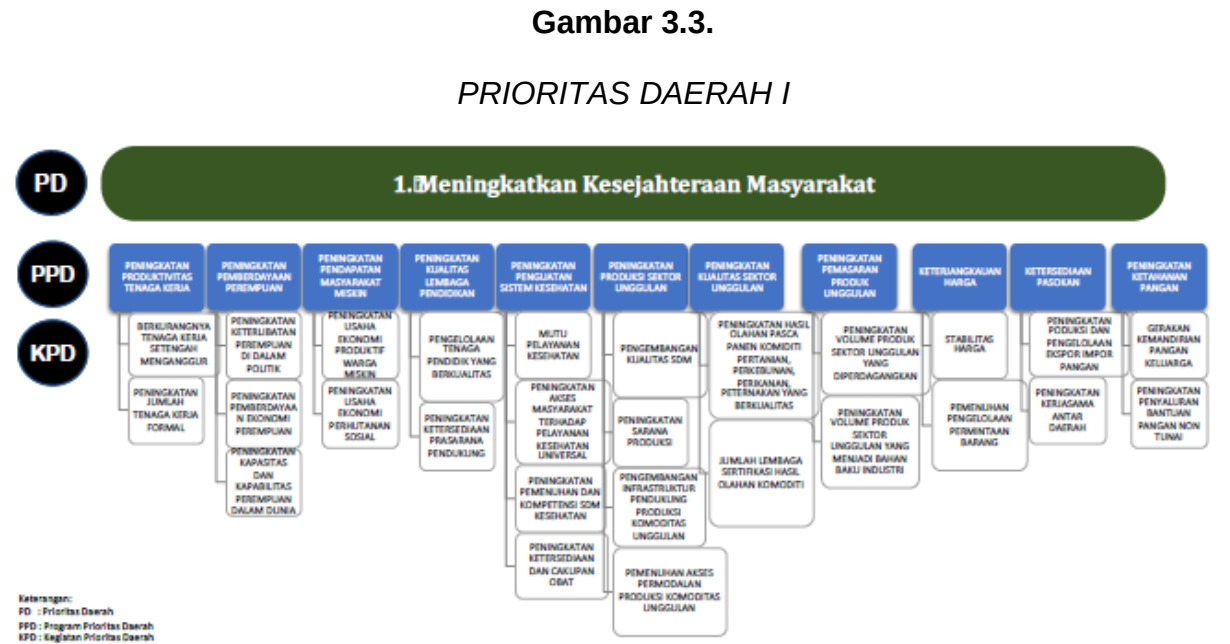
Adapun keterkaitan dan konsistensi antara isu strategis dan Prioritas Daerah RKT Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.

Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Isu Strategis	Prioritas Daerah RKT 2025
Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting	PD1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Peningkatan Kualitas SDM yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing	
Penguatan Ekonomi Kerakyatan yang unggul didukung teknologi dan digitalisasi	PD2 : Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
Peningkatan iklim investasi sektor unggulan didukung Pemerataan Infrastruktur	
Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi dan Penanganan Bencana	PD3 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	PD4 : Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum

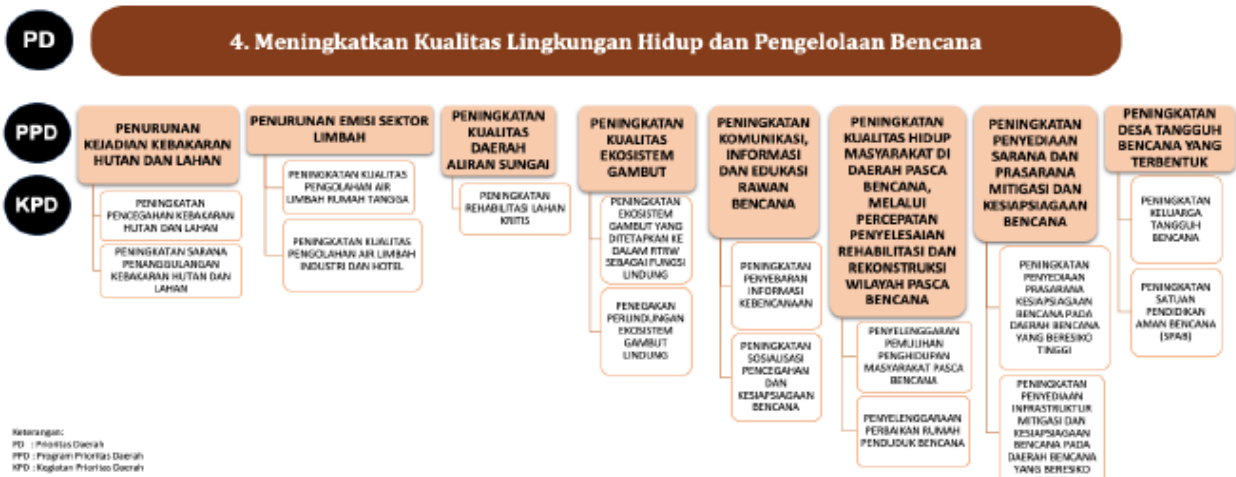
Untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahun 2025, maka setiap Prioritas Daerah dijabarkan menjadi sejumlah Program Prioritas Daerah (PPD) dan Kegiatan Prioritas Daerah (KPD), yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.4.
PRIORITAS DAERAH II



Gambar 3.5.
PRIORITAS DAERAH III



Gambar 3.6.
PRIORITAS DAERAH IV



3.4. Anggaran Pendukung Kinerja Prioritas Daerah

Anggaran Belanja Langsung yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam mendukung kinerja prioritas daerah guna mendukung Sasaran dan Program Kinerja yang telah direncanakan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diuraikan pada bulkona berikut ini.:

Gambar 3.8. Prioritas Daerah II, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

**PRIORITAS
DAERAH II**
**Meningkatkan
Kesejahteraan
Masyarakat**

Indikator Kinerja :
1. Nilai Tukar Petani : 109,11

Program Nomenklatur :

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	(Rp. 2.600.000.000)
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	(Rp. 100.000.000)
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	(Rp. 700.000.000)
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	(Rp. 350.000.000)
Program Penyaluran Pertanian (Rp. 6.600.000.000)	
Program Penyaluran Pertanian (Rp. 34.700.000.000)	
Program Penyaluran Pertanian (Rp. 6.170.000.000)	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	(Rp. 700.000.000)
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (Rp. 2.800.000.000)	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (Rp. 2.500.000.000)	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	(Rp. 500.000.000)
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	(Rp. 2.100.000.000)
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	(Rp. 34.154.500.000)
Program Pertanian Usaha Pertanian (Rp. 75.000.000)	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyaluran Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kelautan (Rp. 710.000.000)	
Program Pengelolaan Aspek Kegeolokan (Rp. 500.000.000)	
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara (Rp. 1.450.000.000)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	(Rp. 23.307.405.300)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	(Rp. 49.455.305.825)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	(Rp. 16.401.920.732)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	(Rp. 2.430.310.000)

Lokasi: 17 Kab/Kota, Prov. Sumsel

OPD : Dinas Pertanian TPH, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan SDM

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kelompok Pembudidaya Ikan dan Nelayan, Kelompok Peternakan

Indikator Kinerja :
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan: 92%

Program Nomenklatur :

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 124.150.457.700) (Dinkes)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Rp. 985.663.000) (Dinkes)

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman (Rp. 236.569.000)

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Rp. 3.250.680.000)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 1.069.946.000) (RS Mata)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 900.000.000) (RS Gigi & Mulut)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 234.670.078.511) (RSUD Siti Fatimah)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (Rp. 35.146.885.000) (RSUD Siti Fatimah)

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Rp. 900.000.000) (RSUD Siti Fatimah)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Rp. 7.664.900.000) (RS Erba)

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Bidang Kesehatan (Rp. 316.800.000) (RS Erba)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 92.523.952.500)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 49.494.202.000)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 28.100.000.000)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 134.728.381.000)

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 82.478.568.675)

Kesehatan Masyarakat (Rp. 2.591.144.000) (APBN)

Pelayanan Kesehatan dan JKN (Rp. 1.140.631.000) (APBN)

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Rp. 2.567.844.000) (APBN)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Kesehatan, RS. Ernaldi Bahar, RS. Mata, Rs. Gigi dan Mulut, RS. Siti Fatimah

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Kementerian Kesehatan

Indikator Kinerja :
Tingkat Kesempatan Kerja : 95,86%
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja : Rp. 80.000.000/orang

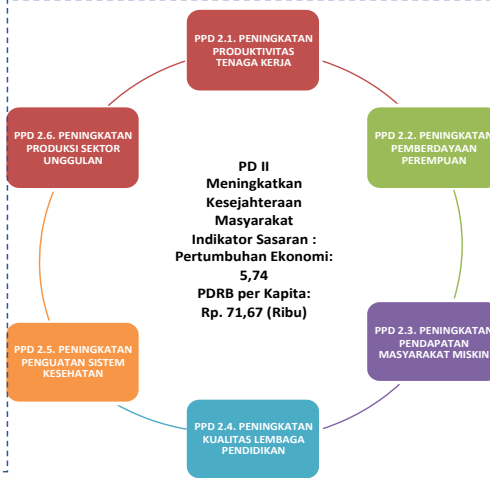
Program Nomenklatur :

Program Perencanaan Tenaga Kerja (Rp. 150.000.000)
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (Rp. 345.000.000)
Program Penempatan Tenaga Kerja (Rp. 585.000.000)
Program Hubungan Industrial (Rp. 484.500.000)
Program Penguasaan Keterampilan Kerja (Rp. 525.000.000)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 31.433.780.000)
Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vocasional dan Produktivitas (Rp. 271.550.000) (APBN)
Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas (Rp. 437.370.000) (APBN)
Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vocasional dan Pemangangan Binalatvitas (Rp. 1.704.964.000) (APBN)
Peningkatan Tenaga Kerja dalam negeri (Rp. 167.046.000) (APBN)
Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja (Rp. 119.315.000) (APBN)
Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (Rp. 68.410.000) (APBN)
Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial (Rp. 100.360.000) (APBN)
Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan (Rp. 11.650.000) (APBN)
Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Rp. 121.330.000) (APBN)
Peningkatan Kompetensi Pengawas Ketenagakerjaan dan Penguji K3 (Rp. 51.830.000) (APBN)
Peningkatan Kualitas Sistem Pengawas Ketenagakerjaan (Rp. 83.270.000) (APBN)
Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Rp. 33.000.000) (APBN)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Stakeholders di luar OPD yang terlibat : Kementerian Ketenagakerjaan



Indikator Kinerja :
Persentase sekolah menengah terakreditasi A: 41%

Program Nomenklatur :

Program Pengelolaan Pendidikan (Rp. 831.463.454.000)
 Program Pengembangan Kurikulum (Rp. 1.200.000.000)
 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan (Rp. 13.915.000.000)
 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan (Rp. 150.000.000)
 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (Rp. 6.675.000.000)
 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan (Rp. 52.845.532.194)
 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan (Rp. 5.800.000.000)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 1.750.919.615.000)
 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 23.930.752.206)
 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 16.358.179.002)

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga

**Indikator Kinerja :
IPG : 93,94**

Program Nomenklatur :

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (Rp. 2.170.000.000)	
Program Perlindungan Perempuan (Rp. 450.500.000)	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga (Rp. 332.423.000)	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak (Rp. 350.000.000)	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) (Rp. 550.000.000)	
Program Perlindungan Khusus Anak (Rp. 1.320.000.000)	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Rp. 9.747.471.000)	

Lokasi: Prov. Sumsel

OPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja :
Pengeluaran Per Kapita :
Rp. 11.244 Ribu

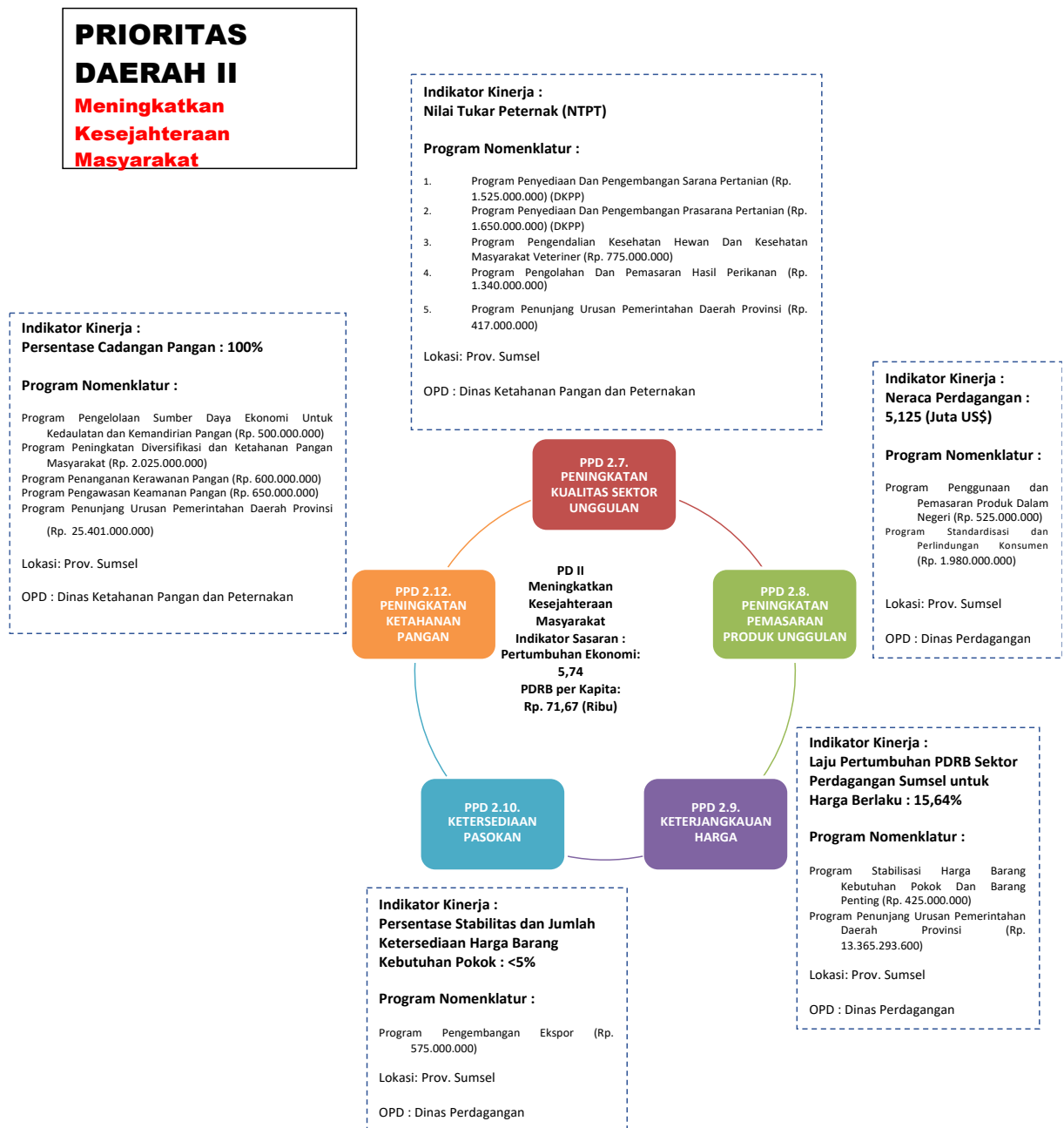
Program Nomenklatur :

Program Pemberdayaan Sosial (Rp. 780.000.000)
Program Penanganan Warga Negara Miskin Korban
Tindak Kekerasan (Rp. 50.000.000)
Program Rehabilitasi Sosial (Rp. 8.559.022.075)
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial (Rp.
7.510.000.000)
Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan
Umum (Rp. 200.000.000)
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (Rp.
150.000.000)
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan
Tanah Untuk Pembangunan (Rp. 100.000.000)
Program Pengelolaan Hutan (Rp. 2.145.000.000)
Program Kesejahteraan Rakyat (Rp. 37.973.874.200)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi (Rp. 23.682.653.000)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi (Rp. 2.723.125.800)

Lokasi: Prov. Sumsel

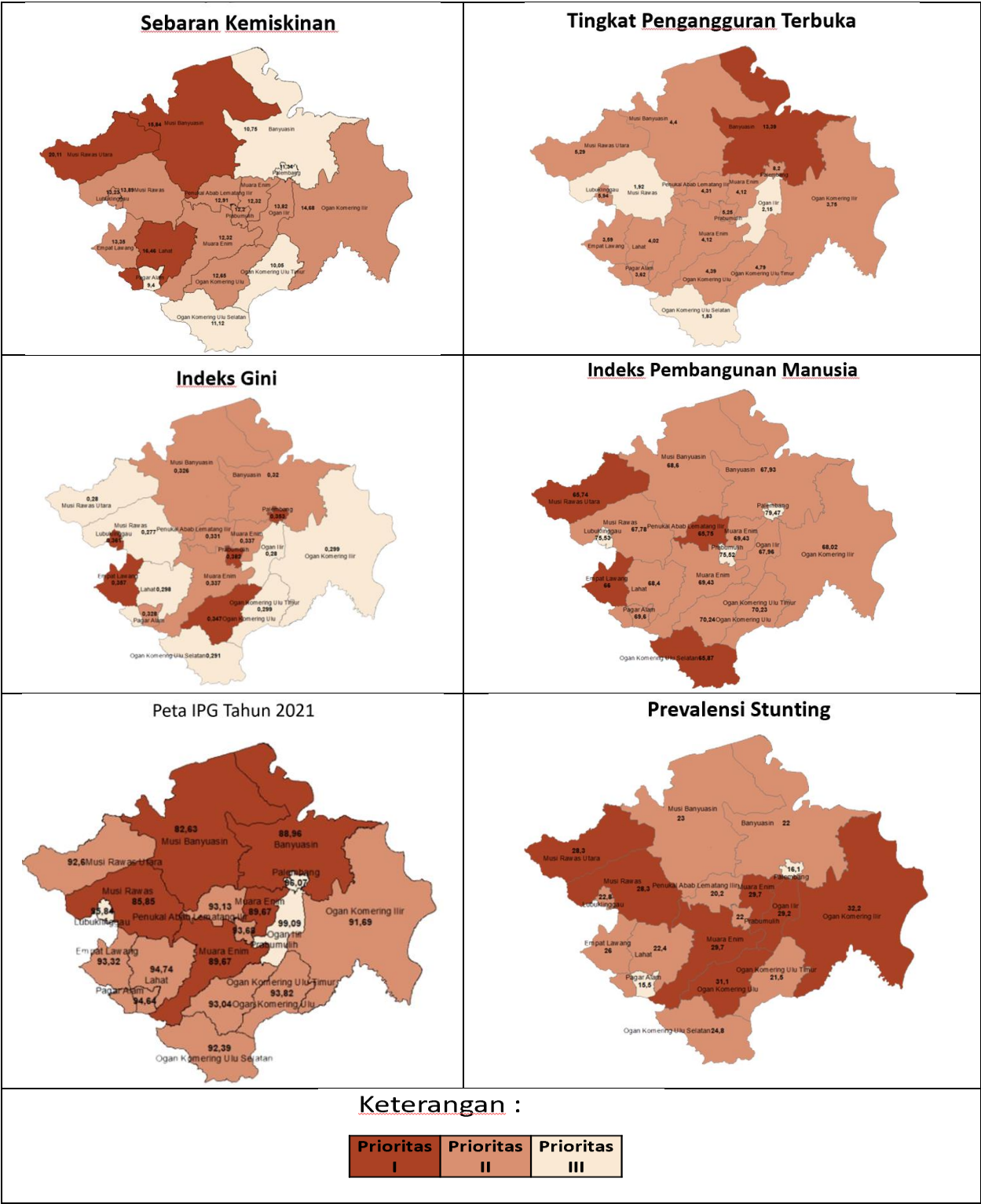
OPD : Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

Gambar 3.9. Prioritas Daerah II, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

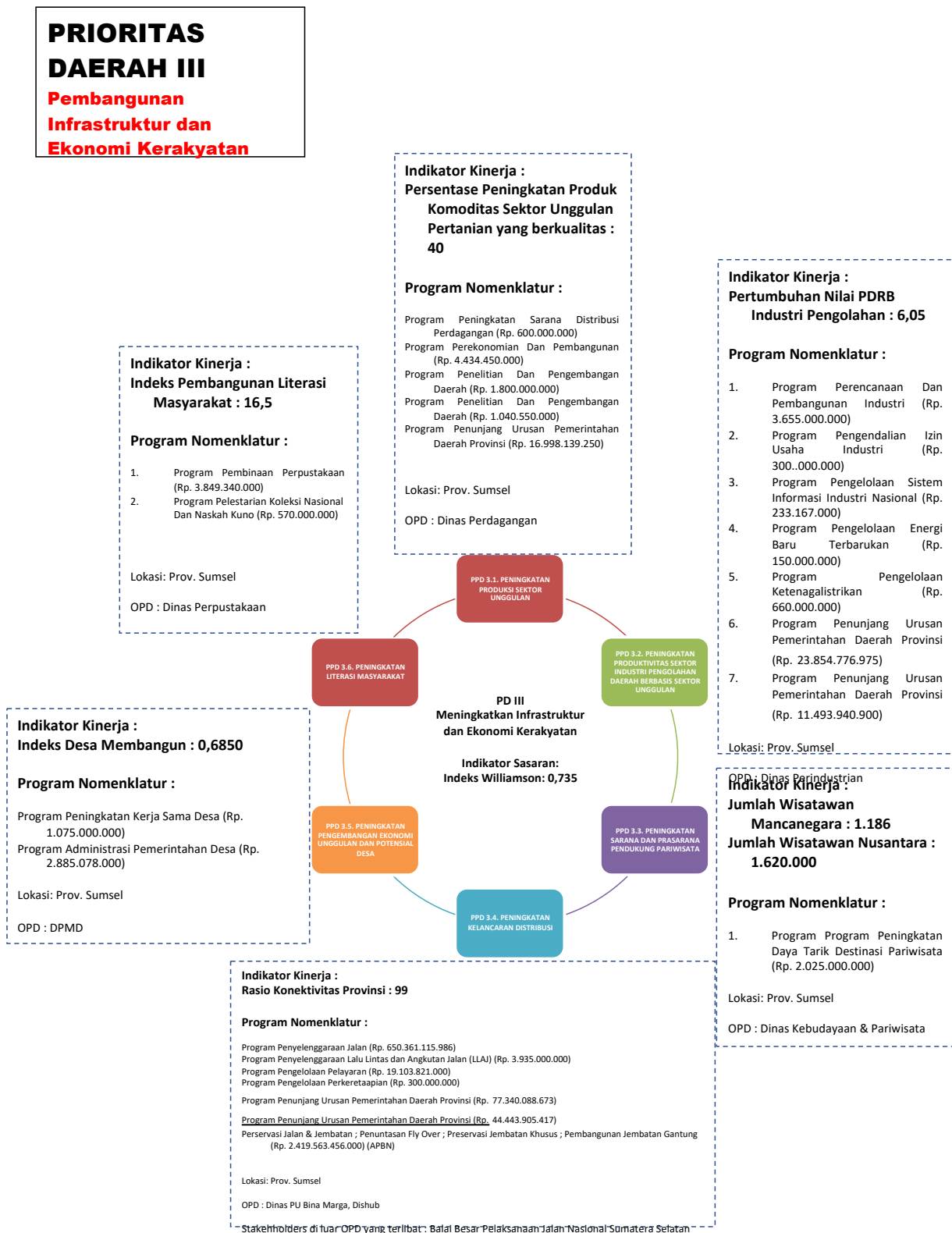


Gambar 3.10. Lokus Prioritas Daerah II, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

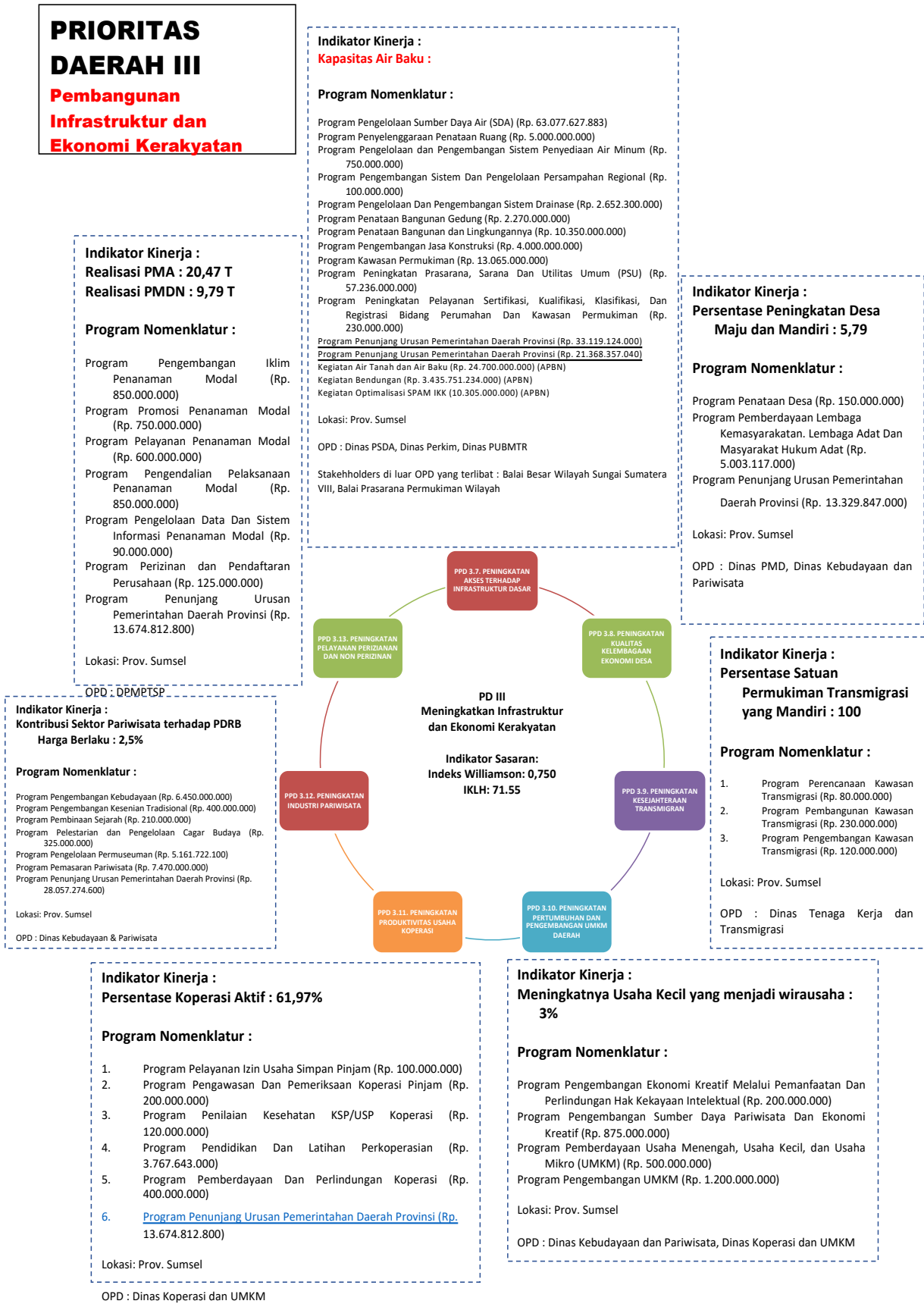
Prioritas Wilayah untuk Prioritas Daerah 2
(Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat)



Gambar 3.11. Prioritas Daerah III, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan

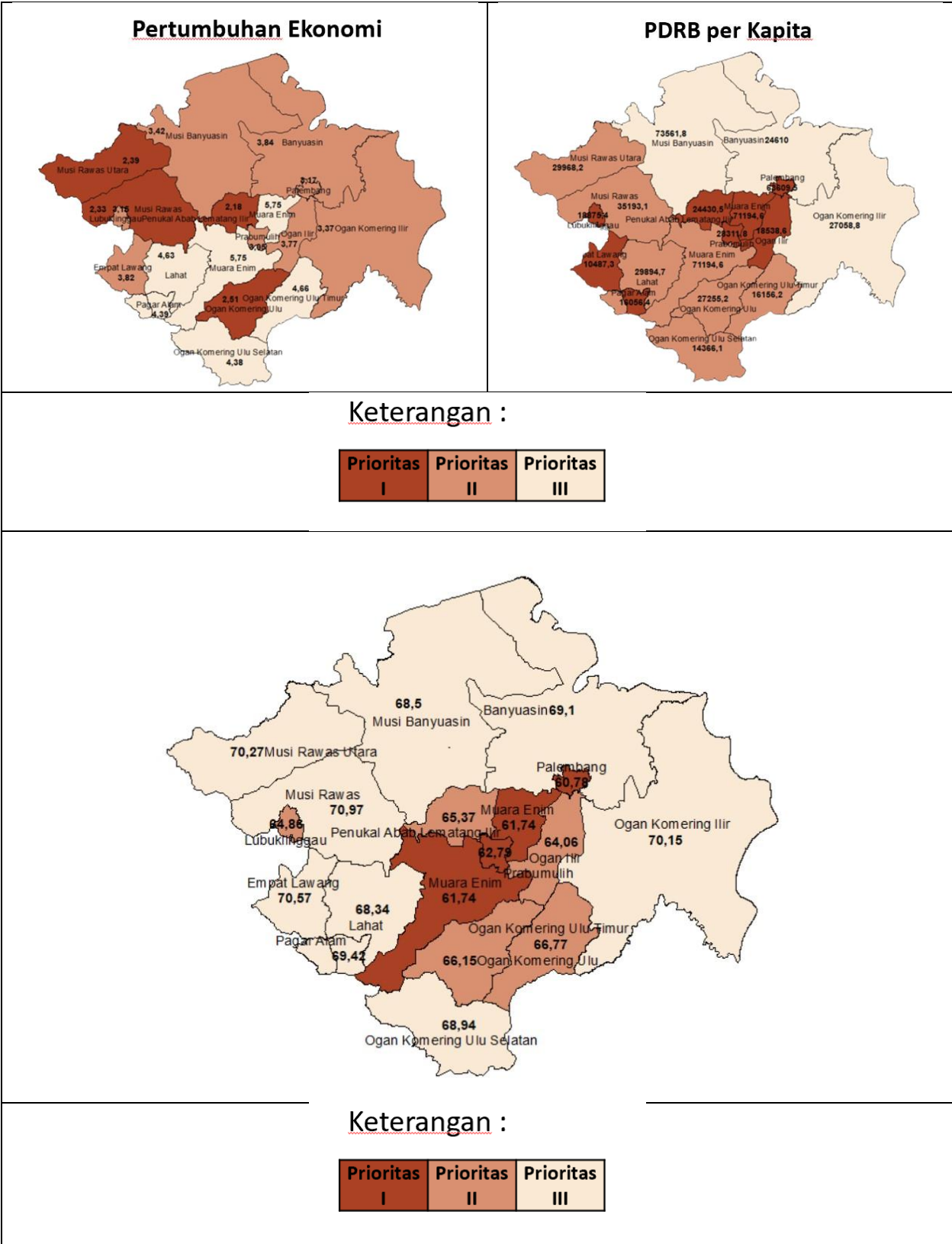


Gambar 3.12. Prioritas Daerah III, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan



Gambar 3.13. Lokus Prioritas Daerah III, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan

Prioritas Wilayah untuk Prioritas Daerah 3
(Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan)



3.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.6.
Target Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2025
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,3 – 5,5
		1.2	Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Juta Rp / Kapita	73,33
		1.3	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6,39
		1.4	Indeks Entropi Theil	Indeks	2,090
2	Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan	2.1	Nilai Tukar Petani	%	109,56
3	Meningkatnya Ekosistem Inovasi	3.1	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,73
4	Terkendalinya Laju Inflasi Daerah	4.1	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5+ / -1
5	Menjadikan Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan	5.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,37 – 10,37
		5.2	Gini Ratio	Indeks	0,316 – 0,320
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,82 – 3,93
7	Meningkatkan Perluasan Akses dan Kesempatan Terhadap Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	7.1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96
		7.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,47
		7.3	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	72,5
		7.4	Prevalensi Stunting	%	13,3
8	Meningkatnya Pelestarian Lingkungan dan Menurunkan Risiko Bencana	8.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,98
		8.2	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,66
		8.3	Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,01
9	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	9.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,25 (B)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2025
10	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	10.1	Nilai SAKIP	Nilai	80,88
11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	6.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	2.791.530.000	APBD
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp	211.661.930.000	APBD
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	2.410.000.000	APBD
4	Hubungan Industrial	Rp	243.000.000	APBD
5	Kawasan Permukiman	Rp	19.275.000.000	APBD
6	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	830.000.000	APBD
7	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	7.829.000.000	APBD
8	Kepegawaian Daerah	Rp	1.947.910.000	APBD
9	Kesejahteraan Rakyat	Rp	37.759.632.820	APBD
10	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Rp	100.000.000	APBD
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	4.029.829.850	APBD
12	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	340.000.000	APBD
13	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	100.000.000	APBD
14	Pelayanan Penanaman Modal	Rp	1.450.000.000	APBD
15	Pelayanan Penghubung	Rp	1.200.000.000	APBD
16	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	275.000.000	APBD
17	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp	650.000.000	APBD
18	Pemasaran Pariwisata	Rp	5.025.000.000	APBD
19	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	210.000.000	APBD
20	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	2.300.000.000	APBD
21	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	400.000.000	APBD
22	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	5.850.937.000	APBD
23	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	4.223.231.500	APBD
24	Pemberdayaan Sosial	Rp	530.000.000	APBD
25	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	3.029.783.351	APBD
26	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	200.000.000	APBD
27	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	3.400.000.000	APBD
28	Pembinaan Perpustakaan	Rp	4.615.000.000	APBD
29	Pembinaan Sejarah	Rp	207.196.001	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
30	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	610.000.000	APBD
31	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	413.471.147.060	APBD
32	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	65.698.292.000	APBD
33	Penanganan Bencana	Rp	1.060.000.000	APBD
34	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	500.000.000	APBD
35	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	700.000.000	APBD
36	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	50.000.000	APBD
37	Penanggulangan Bencana	Rp	7.314.097.129	APBD
38	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	4.775.000.000	APBD
39	Penataan Bangunan Gedung	Rp	1.300.000.000	APBD
40	Penataan Desa	Rp	100.000.000	APBD
41	Penataan Organisasi	Rp	1.475.000.000	APBD
42	Penatagunaan Tanah	Rp	200.000.000	APBD
43	Pencatatan Sipil	Rp	285.000.000	APBD
44	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	757.656.590	APBD
45	Pendaftaran Penduduk	Rp	400.000.000	APBD
46	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	2.749.750.000	APBD
47	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	1.442.500.000	APBD
48	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp	821.000.400	APBD
49	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	2.085.000.000	APBD
50	Penempatan Tenaga Kerja	Rp	705.000.000	APBD
51	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp	250.000.000	APBD
52	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Mha yang Terkait Dengan PPLH	Rp	100.000.000	APBD
53	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	2.400.000.000	APBD
54	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	150.000.000	APBD
55	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	600.000.000	APBD
56	Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp	525.000.000	APBD
57	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	1.775.000.000	APBD
58	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	5.350.000.000	APBD
59	Pengelolaan Arsip	Rp	890.000.000	APBD
60	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	200.000.000	APBD
61	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	9.169.673.940	APBD
62	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)		Rp50.000.000	APBD
63	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	2.325.000.000	APBD
64	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	1.425.000.000	APBD
65	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	200.000.000	APBD
66	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp	485.879.000	APBD
67	Pengelolaan Hutan	Rp	8.260.000.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
68	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	511.000.000	APBD
69	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	10.020.000.000	APBD
70	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	500.000.000	APBD
71	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	500.000.000	APBD
72	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	1.560.000.000	APBD
73	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	3.423.563.235.299	APBD
74	Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp	2.025.000.000	APBD
75	Pengelolaan Pelayaran	Rp	12.500.000.000	APBD
76	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	9.956.064.300	APBD
77	Pengelolaan Pendidikan	Rp	1.098.357.653.500	APBD
78	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	5.543.600.000	APBD
79	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	6.538.120.000	APBD
80	Pengelolaan Perkeretaapian	Rp	728.282.300	APBD
81	Pengelolaan Permuseuman	Rp	5.161.722.000	APBD
82	Pengelolaan Persampahan	Rp	250.000.000	APBD
83	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	36.000.000	APBD
84	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp	290.000.000	APBD
85	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp	500.000.000	APBD
86	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	93.398.286.039	APBD
87	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	212.565.100	APBD
88	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp	98.000.000	APBD
89	Pengelolaan Tanah Kosong	Rp	350.000.000	APBD
90	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp	71.677.278.382	APBD
91	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp	200.000.000	APBD
92	Pengembangan Ekspor	Rp	900.000.000	APBD
93	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	3.022.944.000	APBD
94	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	4.617.100.000	APBD
95	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	8.990.415.250	APBD
96	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	5.700.000.000	APBD
97	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp	50.000.000	APBD
98	Pengembangan Kebudayaan	Rp	6.085.000.000	APBD
99	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	300.000.000	APBD
100	Pengembangan Kurikulum	Rp	679.340.000	APBD
101	Pengembangan Permukiman	Rp	8.460.000.000	APBD
102	Pengembangan Perumahan	Rp	2.921.400.000	APBD
103	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	350.000.000	APBD
104	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	3.965.720.000	APBD
105	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp	550.000.000	APBD
106	Pengembangan UMKM	Rp	1.733.608.649	APBD
107	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	200.000.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
108	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	1.330.000.000	APBD
109	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp	350.000.000	APBD
110	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	855.000.000	APBD
111	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	2.088.078.578	APBD
112	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	2.580.000.000	APBD
113	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	370.000.000	APBD
114	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	1.300.000.000	APBD
115	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	1.950.000.000	APBD
116	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp	8.037.142.774	APBD
117	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	100.000.000	APBD
118	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	1.475.000.000	APBD
119	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	2.235.000.000	APBD
120	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	38.074.533.000	APBD
121	Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	1.225.000.000	APBD
122	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	2.835.000.000	APBD
123	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	3.807.971.100	APBD
124	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	300.000.000	APBD
125	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp	200.000.000	APBD
126	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	900.000.000	APBD
127	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	15.007.525.000	APBD
128	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	50.792.500.000	APBD
129	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.900.000.000	APBD
130	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	3.825.890.422.429	APBD
131	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	5.416.858.000	APBD
132	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	39.948.142.461	APBD
133	Penyelenggaraan Jalan	Rp	550.654.708.822	APBD
134	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	20.523.235.987	APBD
135	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	6.000.000.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
136	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	6.536.229.800	APBD
137	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	300.000.000	APBD
138	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	550.000.000	APBD
139	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan		Rp850.000.000	APBD
140	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	150.000.000	APBD
141	Penyuluhan Pertanian	Rp	56.753.664.725	APBD
142	Perekonomian dan Pembangunan	Rp	3.836.094.000	APBD
143	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	3.862.472.000	APBD
144	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp	200.000.000	APBD
145	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	325.000.000	APBD
146	Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	5.429.285.224	APBD
147	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	100.000.000	APBD
148	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	100.000.000	APBD
149	Perizinan Usaha Pertanian	Rp	75.000.000	APBD
150	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	8.914.584.902	APBD
151	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	150.000.000	APBD
152	Perlindungan Khusus Anak	Rp	1.270.000.000	APBD
153	Perlindungan Perempuan	Rp	512.400.000	APBD
154	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	1.799.404.000	APBD
155	Promosi Penanaman Modal	Rp	1.400.000.000	APBD
156	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp	200.000.000	APBD
157	Rehabilitasi Sosial	Rp	9.947.830.000	APBD
158	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	697.028.000	APBD
159	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	850.000.000	APBD
160	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp	2.000.000.000	APBD
161	Dukungan Manajemen	Rp	4.082.670.000	APBN
162	Infrastruktur Konektivitas	Rp	7.894.092.000	APBN
163	Keolahragaan	Rp	2.110.000.000	APBN
164	Ketahanan Sumber Daya Air	Rp	20.540.469.000	APBN
165	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	735.574.653.000	APBN
166	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	744.649.000	APBN
167	Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp	3.699.210.000	APBN
168	Pembinaan Ketenagakerjaan	Rp	1.625.245.000	APBN
169	Penanaman Modal dan Hilirisasi	Rp	424.365.000	APBN
170	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp	1.322.437.000	APBN
171	Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	Rp	442.946.000	APBN
172	Perdagangan Dalam Negeri	Rp	148.125.000	APBN
173	Perencanaan Pembangunan Nasional	Rp	1.105.856.000	APBN
174	Perpustakaan dan Literasi	Rp	422.938.000	APBN
175	Transmigrasi	Rp	190.780.000	APBN

BAB IV

PENUTUP

Terwujudnya pencapaian perencanaan terhadap kinerja dalam hal ini Rencana Kinerja Tahunan merupakan tujuan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Proses pencapaian target dalam Rencana Kinerja Tahunan perlu dipantau secara rutin dan teratur sehingga target dapat diprediksi dan dievaluasi sedini mungkin. Selama ini evaluasi dimaksudkan untuk mendeteksi apabila target yang ingin dicapai masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja bagi seluruh Organisasi Pejabat Daerah dalam mewujudkan *Good Governance* di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah pada umumnya.